

July 1969
49
D.N.AIDIT.

**Pemetjahan Masalah
Ekonomi Dan
Ilmu Ekonomi Indonesia
Dewasa Ini**



**Pemetjahan Masalah Ekonomi
dan
Ilmu Ekonomi Indonesia
Dewasa ini**

(Prasaran Dimuka Musjawarah Besar Sardjana
Ekonomi Indonesia tgl. 8 Djuli 1964
di Djakarta).

Oleh :
D.N. AIDIT

Jajasan Pembaruan
Djakarta 1964.

Sdr². Pimpinan Musjawarah Besar Sardjana Ekonomi Indonesia, Sdr². Peserta, dan Sdr². sekalian,

Beberapa minggu jl. sewaktu saja menerima kunjungan Sdr. Drs. Surjadi, Ketua Panitia Persiapan Musjawarah Besar Sardjana Ekonomi Indonesia, yang menjampaikan maksud mengadakan Mubes ini dan meminta kepada saya sebagai Ketua Komite Central Partai Komunis Indonesia untuk memberikan prasaran. saya telah menjambut maksud tsb. dengan gembira dan segera menyatakan kesediaan saya untuk memberikan prasaran. Inisiatif ini saya sambut, dan Mubes ini ternyata telah berhasil memperoleh dukungan dari kalangan luas, dari organisasi² sardjana maupun dari Pemerintah, dari partai² politik maupun dari tokoh² terkemuka, dari berbagai organisasi massa maupun dari berbagai lembaga negara, sehingga telah menjadi suatu peristiwa penting dalam kehidupan politik dan kehidupan ekonomi negeri kita.

Sambutan dan dukungan yang luas itu saja anggap wajar, karena Mubes ini akan membahas tema yang sangat aktual dan penting, yaitu „Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi“. Itulah yang menjadi masalah terpenting dalam bidang ekonomi, yaitu melaksanakan Dekon, „Manipolnja ekonomi“, seperti dikatakan Bung Karno dalam Gesuri hampir satu tahun yang lalu.

Sambutan yang begitu luas terhadap Mubes ini juga dapat dimengerti karena yang kali ini membahas masalah ekonomi yang maha penting itu ialah kaum sardjana ekonomi. Masalah² kesehatan biasa dibitjarakan oleh kaum dokter, masalah² teknologi biasa dibitjarakan oleh kaum insinjur, masalah² hukum biasa dibitjarakan oleh sardjana² hukum, dsb. Ada suatu keanehan dinegeri kita, yang paling sedikit bitjara tentang kesulitan² ekonomi dewasa ini, ialah kaum sardjana ekonomi. Padahal, siapa yang tidak berbitjara tentang kesulitan² ekonomi dewasa ini? Dengan ini bukannja saja menganggap bahwa sardjana ekonomi mempunyai sematjam hak khusus untuk membitjarakan

masalah² ekonomi. Masalah² ekonomi menjangkut seluruh kehidupan Rakyat sehingga tak mungkin ia dimonopoli oleh satu golongan masyarakat sadja. Tidak, bukan hak khusus kaum sardjana ekonomi untuk membitjarakan masalah ekonomi, sebaliknya mereka mempunyai kewadajiban khusus dalam bidang ini. Kewadajiban khusus itu ialah memberikan sumbangan se-besar²nja dalam memetjahkan masalah² ekonomi yang selalu harus dihadapi oleh negeri manapun djuga, apalagi oleh Republik Indonesia yang selama beberapa tahun ini memang semakin tenggelam dalam tumpukan problem² ekonomi yang minta segera dipetjahkan dan diatasi.

Dalam tjeramah ini, akan saja bitjarakan 4 masalah, jaitu :

(1) Pemetjahan masalah ekonomi adalah bagian integral daripada pemetjahan masalah politik; (2) Pelaksanaan prinsip anti-feodalisme merupakan masalah paling mendesak bagi ekonomi Indonesia dewasa ini; (3) Mengembangkan ilmu ekonomi Indonesia yang sesuai dengan tugas revolusi nasional-demokratis menudju kemasjaraat Sosialis Indonesia; dan (4) Dekon adalah djalan keluar bagi kesulitan² ekonomi dewasa ini.

I. PEMETJAHAN MASALAH EKONOMI ADALAH BAGIAN INTEGRAL DARIPADA PEMETJAHAN MASALAH POLITIK

Dengan mengambil „Pelaksanaan Dekon” sebagai tema pokok, Mubes telah memberikan suatu landasan yang tepat bagi penanggulangan masalah² ekonomi, jaitu menempatkan usaha ini didalam rangka revolusi Indonesia, mendjadikan masalah ekonomi sebagai bagian integral daripada politik. Sudah terlalu lama kaum sardjana ekonomi Indonesia pada umumnya mengambil sikap masa-bodoh terhadap masalah politik, dan berusaha membahas masalah ekonomi sebagai masalah yang bersifat teknis melulu, dengan hukum² „yang berlaku untuk semua zaman” yang bertolak dari pandangan² subjektif dan mengabaikan kenyataan objektif yang hidup didalam masyarakat. Kenyataan

objektif sesuatu masyarakat terutama dinjatakan melalui hubungan² produksi yang bisa mendorong tapi djuga bisa menghambat perkembangan tenaga² produktif, dan melalui bangunan-atas, terutama kekuasaan politik, yang djuga sangat erat hubungannya dengan hubungan² produksi, yang dapat mempertahankan atau mengubah hubungan² produksi.

Pengalaman Rakyat Indonesia sudah ber-ulang² kali membuktikan bahwa masalah apapun tak mungkin dipisahkan dari politik, artinja dari masyarakat dan dari masalah kekuasaan politik. Olahraga tak mungkin dipisahkan dari politik. Kesenian tak mungkin dipisahkan dari politik. Apalagi ekonomi samasekali tak mungkin dipisahkan dari politik. Bagi kami kaum Marxis, politik adalah pernyataan terpusat daripada ekonomi, atau dengan kata² lain, ekonomi adalah dasar dan tudjuan daripada politik.

Bahkan, usaha untuk me-misah²kan ekonomi dari politik merupakan suatu politik sendiri — politik memisahkan ekonomi dari politik. Mengapa demikian? Bagi Indonesia memisahkan ekonomi dari politik berarti menolak pandangan Deklarasi Ekonomi (Dekon) yang mengatakan bahwa „strategi dasar ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari strategi umum revolusi Indonesia. Manifesto Politik serta pedoman² pelaksanaannya telah menetapkan strategi dasar ekonomi Indonesia yang menjadi bagian mutlak daripada strategi umum revolusi Indonesia”. (Dekon, fasal 3).

Apa yang menjadi strategi dasar revolusi Indonesia? Soal ini sudah djelas dalam Manipol, jaitu bahwa perspektif revolusi Indonesia adalah Sosialisme, sedangkan tugas kita sekarang ialah tugas anti-imperialisme dan anti-feodalisme, bahwa tenaga² revolusi ialah seluruh Rakyat yang dirugikan oleh imperialisme dan feodalisme dengan kaum buruh dan kaum tani sebagai sokogurunya. Strategi dasar ini dengan tegas ditrapkan dalam bidang ekonomi oleh Dekon yang menegaskan bahwa strategi dasar ekonomi Indonesia meliputi dua tahap, jaitu „tahap pertama (dimana) kita harus mentjiptakan susunan ekonomi yang bersifat nasional dan demokratis, yang bersih dari sisa² imperialisme dan bersih dari sisa² feodalisme”. Tahap per-

tama ini ditegaskan sebagai persiapan untuk „tahap kedua, yaitu tahap ekonomi Sosialis Indonesia, ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia”. (Dekon, fasal 3).

Berdasarkan strategi dasar ekonomi ini, maka Dekon menjimpulkan bahwa: „Kita sekarang sedang berada dalam tahap pertama Revolusi kita. Kewajiban kita dibidang ekonomi dalam tahap ini ialah mengikis habis sisa² imperialisme dan sisa² feodalisme dibidang ekonomi, menggerakkan semua potensi nasional untuk meletakkan dasar dan mempertumbuhkan suatu ekonomi nasional yang bebas dari imperialisme dan feodalisme sebagai landasan menuju kemasjaraat Sosialis Indonesia”. (Dekon, fasal 4). Rumusan Dekon ini dengan jelas menyatakan bahwa syarat untuk „menggerakkan semua potensi nasional”, yaitu untuk membebaskan dan mengembangkan tenaga² produktif dalam masyarakat Indonesia, ialah mengikis habis sisa² imperialisme dan feodalisme, artinya mengakhiri hubungan² produksi yang bersifat kolonial dan setengah feodal yang masih bertjokol dalam masyarakat Indonesia.

Atau lebih tegas lagi dikatakan dalam Gesuri: „Dengan adanya Dekon, orang tidak diperkenankan lagi mengkisruhkan dua tahapan Revolusi tidak dapat ditolerir pendapat, bahwa sosialisme bisa diselenggarakan tanpa menyelesaikan lebih dahulu perjuangan nasional-demokratis, yaitu tanpa menghabis-tamatkan lebih dahulu sisa² imperialisme dan feodalisme kita sekarang ini belum berada dalam alam Sosialisme”. (Gesuri, Departemen Penerangan R.I., Penerbitan Khusus No. 280, hal. 32 — 33).

Mereka yang berusaha men-depolitik-kan ekonomi justru bermaksud untuk meyakinkan kita bahwa ekonomi tak ada hubungan apapun dengan tugas² anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Sedar atau tidak, sikap yang demikian berarti membiarkan imperialisme dan feodalisme meradjalela dalam ekonomi kita, sedangkan ini tak dapat dibantah adalah sikap politik yang se-njata²nja. Bukan hanya ada usaha men-depolitik-kan ekonomi, malahan lebih dari itu, ada usaha meng-ekonomi-kan politik, artinya berusaha supaya politik Republik kita disesuaikan dengan apa yang

mereka anggap sebagai kepentingan ekonomi „untuk mentjegah kehantjuran ekonomi Indonesia”. Dengan dalih sematjam ini, ada orang² yang berusaha supaya politik konfrontasi dengan „Malaysia” dihentikan sadja supaya kita bisa „membereskan ekonomi lebih dulu”. Sikap demikian berarti mengabaikan kenyataan bahwa ekonomi Indonesia hanya dapat dibereskan dengan konfrontasi terhadap imperialisme dan feodalisme. Sikap demikian berarti membantah kebenaran Dwikora yang dengan tegas menempatkan usaha² untuk memperhebat ketahanan nasional — dimana masalah ekonomi merupakan salahsatu aspek yang terpenting — didalam rangka tugas-kewajiban Rakyat Indonesia untuk membantu Rakyat Kalimantan Utara, Malaka dan Singapura dalam membubarkan projek neo-kolonialis „Malaysia”.

Kesulitan² ekonomi Indonesia pada dasarnya bukan disebabkan karena kita terlalu banjak menggajang imperialisme, tetapi justru sebaliknya, karena masih terlalu sedikit menggajang imperialisme dibidang ekonomi dan karena ekonomi feodal boleh dikatakan belum digajang samasekali.

Bukanlah samasekali suatu kebetulan, bahwa justru kaum imperialis AS, yang telah memaksakan Pemerintahan Indonesia untuk menjalankan tindakan² teror 26 Mei 1963 sebagai syarat untuk memperoleh „bantuan ekonomi”, juga menentukan syarat kedua, yaitu agar Indonesia melepaskan konfrontasi dengan „Malaysia”. Memang, tindakan² ekonomi 26 Mei dan projek neo-kolonialis „Malaysia” pada dasarnya didjwai oleh satu tudjuan, yaitu membuka ekonomi Indonesia sebagai lapangan penanaman modal imperialis dan membendung serta menghantjurkan Republik Indonesia, hasil perjuangan revolusioner Rakyat Indonesia. Republik Indonesia yang berdaulat merupakan alat yang paling ampuh dalam tangan Rakyat Indonesia untuk mentjegah merasuknja modal monopoli asing yang ingin sekali memperkuat dominasinja atas ekonomi Indonesia.

Satu hal yang saja anggap penting sekali disadari oleh para ahli ekonomi dalam membahas masalah ekonomi ialah bahwa Republik Indonesia tak mungkin

hantjur oleh karena kesulitan² ekonomi. Satu²nja hal jang bisa menjebabkan kehantjuran dan djatuhnja Republik Indonesia dibawah dominasi penuh kaum imperialis ialah perpetjahan nasional. Seperti dikatakan didalam Manipol, „..... modal pokok bagi tiap² revolusi nasional, menentang imperialisme, kolonialisme ialah konsentrasi kekuatan nasional dan bukan perpetjahan kekuatan nasional”. Konstatasi ini sepe- nu²nja berlaku bagi Indonesia karena revolusi Indo- nesia „adalah satu Revolusi nasional” (lihat Tubapi, hal. 82).

Sebaliknya perlu disedari, bahwa sekalipun dengan ekonomi jang berdjalan agak lantjar, Republik kita tak mungkin dilindungi dari kehantjuran djika kekuatan² nasional terpetjah-belah.

Dengan mengatakan demikian, bukan samasekali maksud saja untuk menyatakan bahwa, dus, kita tak usah memikirkan masalah ekonomi sebab toh „negeri kita tidak akan hantjur”. Sebaliknya, saja dengan keras menotak fitnahan golongan² tertentu se-akan² kaum Komunis sengadja ingin kemerosotan ekonomi un- tuk kemudian bisa „merebut kekuasaan”. Fitnahan jang kedji itu samasekali dibantah oleh peranan aktif jang selalu dimainkan oleh PKI dalam mengadakan konsep² dan usul² kongkrit untuk mengatasi kesulitan² ekonomi dewasa ini. Bahkan, PKI mungkin merupakan partai jang paling radjin dan paling banyak mengemu- kakan gagasan² dan mengeluarkan buku², brosur², tulisan², resolusi dls mengenai masalah ekonomi selama beberapa tahun belakangan ini.

Tidak, kaum Komunis tidak menginginkan kemero- sotan ekonomi tetapi selalu berusaha keras untuk me- nanggulangi kesulitan² ekonomi dan PKI sepenuhnya yakin bahwa, disamping tugasnja untuk terus-menerus mengadakan konsep² kongkrit mengenai masalah² ekonomi, kaum Komunis djuga harus terus-menerus mengkonsolidasi persatuan nasional dan memperhebat perdjuaan Rakjat Indonesia melawan imperialisme dan feodalisme karena hanya dengan djalan ini akan terbuka kemungkinan jang kongkrit untuk melaksana- kan semua konsep jang baik itu.

Usaha² men-depolitik-kan ekonomi mudah²an tidak akan bisa mendapat pasaran dalam Mubes ini, karena

disamping, tema pokok jang tepat, jaitu Pelaksanaan Dekon, Mubes didjiwai oleh beberapa prinsip dasar jang saja anggap tepat sekali, jaitu (1) kepertjajaan pada kekuatan diri sendiri, (2) anti-imperialisme dan anti-feodalisme, dan (3) menudju ke Sosialisme Indo- nesia. Memang benar pendirian fihak penyelenggara Mubes ini untuk menyatakan dengan tegas beberapa prinsip² dasar, karena walaupun tema „Pelaksanaan Dekon” seharusnya sudah tjukup djelas dan tidak perlu diperintji lagi, namun kita tjukup banyak pengalaman, bahwa bisa dalam kata² „pelaksanaan Dekon”, tetapi dalam perbuatan djustru menjalahi Dekon. Dan djus- tru inilah jang terdjadi pada tanggal 26 Mei tahun jl dengan aenja tindakan² ekonomi jang bahkan diberi djudul „untuk melaksanakan Dekon” tetapi jang de- ngan njata melakukan hal² jang samasekali dilarang oleh Dekon.

Ada orang² jang siang-malam bitjara tentang me- laksanakan Dekon tetapi tidak pernah mau mengakui bahwa esensi daripada Dekon pada dewasa ini ialah anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Ini tidak lain adalah Dekon jang dikebiri.

Tiga prinsip jang telah ditetapkan sebagai prinsip² dasar jang mendjiwai Mubes ini setjara tepat meng- gambarkan isi pokok daripada Dekon sehingga saja yakin, bahwa djika Sdr² berhasil membawakan prinsip² itu kedalam pembahasan anak² tema jang akan dibi- tjarakan didalam komisi² nanti, Mubes akan bisa menghasilkan keputusan² jang Dekonis dalam artikata sebenarnja, dan jang akan disambut baik oleh Rakjat pekerdja sebagai sumbangan kongkrit dari kaum sar- djana untuk memetjahkan masalah² ekonomi dengan tjara jang sesuai dengan kebutuhan revolusi Indonesia pada dewasa ini.

II. PELAKSANAAN PRINSIP ANTI-FEODALIS- ME MERUPAKAN MASALAH PALING MENDESAK BAGI EKONOMI INDONESIA DEWASA INI

Saja ingin menggunakan kesempatan ini untuk membawa perhatian Sdr² setjara khusus pada masalah

• revolusi agraria, jaitu aspek anti-feodal atau aspek demokratis daripada revolusi Indonesia. Hal ini saja laku-kan, karena memang inilah masalah yang paling mendesak pada dewasa ini, dan juga karena saja tahu bahwa ilmu ekonomi yang diadjarkan diperguruan tinggi negeri kita umumnja mengabaikan hal ini, bahkan menarik kesimpulan² yang sangat menjesatkan dan keliru mengenai masalah agraria di Indonesia. Kalau nanti didalam salahsatu komisi Mubes ini akan diadakan diskusi tentang „peranan sardjana ekonomi dalam ikut mensukseskan pelaksanaan Dekon dan menumbuhkan ilmu ekonomi Sosialis Indonesia“, saja kira bahwa kekurangan² yang sungguh menjolok sekali dalam hal menganalisa masalah agraria dinegeri kita selama ini, perlu mendapat perhatian yang khusus. Ilmu ekonomi Sosialis Indonesia hendaknja djangan dianggap sesuatu yang terbatas pada menganalisa struktur ekonomi sosialis yang akan kita bentuk. Ilmu ekonomi sosialis akan bersifat abstrak dan tidak berguna kalau tidak mengambil sebagai titiktolaknja pembahasan setjara ilmiah tentang aspek anti-imperialis dan anti-feodal dari revolusi kita. Tanpa ini, ilmu ekonomi tak mungkin dipergunakan sebagai alat untuk mentjapai Sosialisme dan sembojan „ilmu untuk Revolusi“ tidak ada artinja samasekali.

Bahwasanja revolusi agraria atau landreform merupakan bagian mutlak daripada revolusi Indonesia sudah tak dapat dibantah lagi. Dalam pidato Djarek tahun 1960, Presiden Sukarno sudah menjatakan dengan gamblang sekali bahwa „Landreform berarti melaksanakan satu bagian yang mutlak dari Revolusi Indonesia“. Bahkan dikatakan oleh Bung Karno dalam pidato itu bahwa „Revolusi Indonesia tanpa landreform adalah sama sadja dengan gedung tanpa alas, sama sadja dengan pohon tanpa batang, sama sadja dengan omong-besar tanpa isi“ (Tubapi, hal 223).

Mengapa landreform atau revolusi agraria merupakan bagian mutlak daripada revolusi Indonesia? Landreform berarti membebaskan kaum tani dari penghisapan feodal yang djustru merupakan halangan terpokok terhadap perkembangan tenaga produktif didesa³, jaitu kaum tani sendiri. Kalau kita mau bitjara

tentang kepertjajaan pada kekuatan diri sendiri, atau berdiri diatas kaki sendiri, perlu kita tanjakan, apa yang merupakan kekuatan kita sendiri yang paling vital? Tak lain tak bukan ialah mereka yang bekerdja, yang mentjiptakan kekajaan materiil — tenaga produktif — atau dalam kata lain, kaum buruh dan kaum tani yang telah dinjatakan sebagai sokoguru revolusi Indonesia „baik karena vitalnja maupun karena sangat banjak djumlahnja“, seperti dikatakan didalam Manipol. Perhatikan! Tidak hanya karena besar djumlahnja, tetapi juga karena vitalnja! Tanpa tenaga produktif tidak ada produksi. Tanpa produksi tidak ada masjarakat. Betapa rupanja kita dalam ruangan ini seandainja tidak ada kaum buruh yang memproduksi tekstil!

Bung Karno dalam Gesuri telah berkata bahwa „tenaga² yang paling produktif adalah buruh dan tani. Oleh karena itu maka usaha menaikkan produksi setjara positif harus mengembangkan tenaga produktif buruh dan tani. Tanpa tenaga buruh dan tani, tak mungkin menaikkan produksi!“ (Gesuri, hal. 33). Inilah production approach, atau pendekatan dari segi produksi, dalam artikata yang sebenarnja.

Hendaknja sebutan sokoguru ini diberi interpretasi yang tepat. Ini bukan sekedar perasaan kasihan pada si buruh atau sitani sebagai „orang ketjil“ yang perlu dibantu sedikit³. Ini adalah soal tenaga produktif dalam masjarakat kita, karena apapun yang ada dalam masjarakat itu sendiri ditjiptakan oleh tenaga produktif, termasuk masjarakat itu sendiri. Kalau tenaga produktif itu di-halang²i oleh hubungan² produksi yang tidak sesuai, maka satu²nja tjara untuk membebaskan tenaga produktif tsb. ialah mengubah hubungan² produksi itu. Inilah hakekat daripada pentingnja masalah landreform. Hanya dengan merombak hubungan² produksi setjara feodal yang masih sangat kuat di-desa² kita, tenaga produktif kaum tani akan bisa dibebaskan. Hanya dengan demikian akan bisa kita memberikan „alas“ kepada „gedung“ yang harus dibangun oleh revolusi Indonesia, untuk memindjam tjontoh Bung Karno dalam pidato Djarek itu.

Pengertian tentang mutlak perlunja landreform, artinja tentang revolusi agraria sebagai intisari dari-

pada revolusi Indonesia, sangat dikatjaukan dan "diperhambat oleh analisa yang menjesatkan yang dilakukan oleh sardjana² ekonomi Indonesia tertentu, yang umumnja melandjutkan pandangan kaum kolonialis Belanda, dan yang beranggapan bahwa di Indonesia "tidak ada tuantanah" atau "tidak ada tuantanah setjara besar²an", artinja tidak ada masalah feodalisme dan oleh karenanja tidak dibutuhkan landreform. Yang paling "berdjasa" dalam menjebarkan analisa yang djahat ini ialah Sumitro, seorang yang sudah terkenal dan sudah telandjang bulat sebagai pemberontak dan pengchianat terhadap Republik, tetapi yang teori² ekonominja yang sama chianat dan sama djahatnja belum tjukup ditelandjangi, masih mendapat tempat dalam perguruan² tinggi kita dan masih mendjiwai pegawai² tinggi dalam aparatur ekonomi negeri kita.

Apa yang dikatakan oleh Sumitro tentang masalah agraria? Dalam bukunya **Ekonomi Pembangunan**, kita batja sbb.:

"Di Indonesia pada umumnja belum ada golongan tuantanah (pemilik tanah) setjara besar²an. Tetapi petani ketjil terbelenggu oleh kekuasaan golongan tengkulak dan golongan pedagang besar yang biasanja terpusat dikota. Genggaman ekonomi oleh golongan pedagang dikota terhadap para produsen ketjil didaerah dilakukan melalui perkreditan dan perhutangan. Golongan produsen se-akan² terus-menerus berada dalam keadaan hutang. Dibeberapa negara underdeveloped yang lainnja, terdapat golongan tuantanah setjara besar²an. Disitu sebagian terbesar penduduk daerah merupakan golongan tani yang tidak mempunyai tanah sendiri. Mereka hidup atas tanah yang dimiliki oleh segolongan yang djumlahnja ketjil tetapi kekuasaannja besar". (**Ekonomi Pembangunan**, P.T. Pembangunan, 1955, hal. 48).

Ini sungguh suatu kesimpulan yang palsu dan menutupi keadaan sebenarnja di-desa² kita. Apa yang dikatakan terdapat "dibeberapa negara underdeveloped yang lainnja" djustru terdapat disini, di Indonesia. Sumitro berusaha menggambarkan se-akan² kaum tani hanja sekedar menghadapi masalah modal pedagang dari kota, artinja bukan masalah **penghisapan feodal**

melainkan masalah penghisapan kapitalis. Kesimpulan ini djuga akan membawa pembatjanja pada soal kontradiksi antara yang "asli" dan yang "bukan asli" karena bukankah "golongan tengkulak dan pedagang besar yang biasanja terpusat dikota" umumnja terdiri dari orang² yang keturunan asing sebagai akibat peninggalan masjarakat lama?

Lagi pula, menurut Sumitro hanjalah "dibeberapa negara underdeveloped yang lainnja", artinja tidak di Indonesia, terdapat keadaan dimana "sebagian terbesar penduduk daerah merupakan golongan tani yang tidak mempunyai tanah sendiri". Djadi, se-akan² di Indonesia "sebagian terbesar penduduk daerah merupakan golongan tani yang mempunyai tanah sendiri". Sedangkan menurut Menteri Kordinator Bidang Pertanian dan Agraria, Sadjarwo SH, 60% dari penduduk desa Indonesia tidak memiliki tanah. Itulah bahajanja kalau seorang sardjana suka menarik kesimpulan² tidak atas dasar penelitian tentang keadaan konkrit dinegeri kita tetapi atas dasar pandangan subjektif. Dan dalam hal ini Sumitro hanja sekedar mengambil-alih fikiran Van Mook yang djuga berpendapat bahwa di Indonesia tidak ada tuantanah!

Apa artinja pula, kalau dikatakan bahwa "di Indonesia belum ada golongan tuantanah setjara besar²an"? Apakah dengan ini ingin dinjatakan bahwa tuantanah "setjara ketjil²an" tidak apa², tidak menghisap kaum tani? Menurut kenjataanja, pemilikan tanah oleh tuantanah di Indonesia relatif memang ketjil, tetapi djustru karena ketjil itu penghisapannja adalah sangat intensif. Selain daripada itu djumlah tuantanah adalah sangat banyak, dan djika ditotal milik tuantanah yang banyak djumlahnja ini adalah djuga besar. Ja, apa yang mau dikata, kalau mengadakan analisa seperti Sumitro ini dengan tidak lebih dahulu menegaskan apa yang dimaksudkan dengan kata "tuan-tanah" itu. Sungguh satu analisa yang kosong dan samasekali tidak ilmiah. Kalau mau menentukan apakah ini atau itu ada atau tidak ada, apakah tidak seharusnya memberikan suatu definisi lebih dulu?

Kaum Komunis Indonesia sudah lama membuat definisi tentang klas² di-desa² Indonesia, dan atas dasar inilah, kami mengadakan penelitian² dan me-

njimpulkan apakah tuantanah ada atau tidak dinegeri kita.

Tuantanah adalah orang yang memiliki tanah yang samasekali tidak dikerdjakan sendiri, dan yang sepenuhnya digarap oleh orang lain sehingga seluruh keajaannja, dari udjung rambutnja sampai djari-kakinja, diperoleh dari menghisap tenagakerdja orang lain dalam bentuk sewatanah. Dari hubungan pemilik dengan penggarap ini timbul penghisapan melalui sewa tanah berupa hasilbumi, wang atau kerdja, artinja penghisapan feodal.

Pengertian ini sepenuhnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bung Karno dalam Djarek, dimana dikatakan sbb: „Tanah tidak boleh mendjadi alat penghisapan! Tanah untuk Tani! Tanah untuk mereka yang betul² menggarap tanah! Tanah tidak untuk mereka yang duduk ongang² mendjadi gemuk-gendut karena menghisap keringatnja orang² yang disuruh menggarap tanah itu!” (Tubapi, hal. 224). Inilah tuantanah! Inilah definisi tuantanah, jaitu orang² yang ongang² tidak bekerdja, hidup dari menghisap keringat orang² yang disuruh menggarap tanahnja. Tentang berapa luasnja tanah yang bisa memungkinkan orang „duduk ongang²” itu tergantung pada banyak hal, seperti kesuburan tanah, irigasi dll. Di Delanggu (Djateng) dengan 2 ha orang sudah bisa hidup ongang², karena tanahnja subur, sedangkan di Badjonegoro tidak demikian halnya.

Dengan analisa yang demikian, maka masalahnja mendjadi djelas. Disatu fihak, misalnja, seorang yang memiliki tanah yang agak banyak tetapi yang ikut sendiri mengerdjakan pekerdjaan pokok, walaupun disamping itu ia djuga sekedar melakukan penghisapan setjara feodal atau setjara kapitalis, bukanlah seorang tuantanah. Ia adalah tanikaja dan karenanja ia tidak mendjadi sasaran dalam mendjalankan landreform. Mengapa? Karena bagaimanapun djuga, ia tetap merupakan tenaga produktif, karena ia djuga bekerdja sendiri, sehingga masih ada djuga gunanja bagi revolusi dan perkembangan ekonomi kita.

Demikian pula misalnja seorang pegawai negeri yang memiliki sedikit tanah yang sepenuhnya digarap oleh orang lain. Walaupun ia melakukan penghisapan

feodal (sewa tanah), tapi ia bekerdja sendiri sebagai pegawai, dan djika penghasilannja yang pokok diperoleh dari djabatannja sebagai pegawai, maka ia tidak boleh diperlakukan sebagai tuantanah. Ia adalah penjewan-tanah ketjil. Akan tetapi, djika tanahnja begitu luas dan subur sehingga ia tanpa bekerdjapun bisa hidup ongang² dari sewa tanah, maka ia adalah tuantanah dan mendjadi sasaran revolusi.

Hal ini saja anggap perlu diuraikan, karena selalu akan terdapat rintangan² dalam melakukan revolusi agraria atau landreform djika tidak ada kedjelasan mengenai sasarannja. Sungguh, masalah terpenting dalam revolusi ialah mengenal siapa musuh revolusi disamping mengenal kawan revolusi!

Kaum Komunis Indonesia sudah sedjak lama berpendirian, bahwa masyarakat Indonesia masih tetap merupakan masyarakat setengah-feodal dengan sisa² feodal yang berat. Program PKI yang disahkan 10 tahun jl. dalam Kongres Nasional ke-V PKI meliputi tuntutan² landreform yang radikal yang sepenuhnya sesuai dengan sembojan Bung Karno „Tanah untuk mereka yang betul² menggarap tanah”. Sudah lama Program itu mendjadi sasaran dan edjekan kaum reaksioner yang menjemoo PKI karena djandji² tanah untuk kaum tani hanya bisa dipenuhi, katanja, dalam bentuk tanah untuk kuburan. Tetapi sekarang, Program resmi revolusi Indonesia sudah dengan tegas menjatakan kemutlakaannja landreform dan menolak samasekali pandangan Sumitro yang amat keliru itu.

Dalam hubungan ini, saya dapat kemukakan disini beberapa pengalaman langsung dari suatu proyek riset. (research) yang telah saya lakukan diseluruh Djawa dengan dibantu oleh kuranglebih 250 kader PKI dan organisasi² massa yang langsung saja pimpin, dan yang dibantu oleh kuranglebih 3000 petugas di-desa² dan ketjamatan². Sedjak bulan Februari tahun ini sampai akhir bulan Mei, saya telah melakukan suatu riset mengenai keadaan kaum tani dan gerakan tani diseluruh pulau Djawa. Didalam riset itu, telah diriset desa² yang tersebar dalam 124 ketjamatan di Djawa Barat, Djawa Tengah dan Djawa Timur. Desa² yang diriset dipilih setjara teliti supaya dapat meliputi berbagai desa pertanian, nelajan, kehutanan, perkebunan dsb sehing-

ga tjukup bisa menggambarkan variasi jang sungguh luas jang terdapat dipulau Djawa ini.

Tak mungkin bagi saja pada kesempatan ini untuk memberikan uraian lengkap tentang hasil² riset itu. Semuanya telah dan akan diumumkan dalam bentuk buku. Tetapi saja ingin mengemukakan beberapa hal, sebab saja anggap hasil² riset itu erat sekali hubungannya dengan tema pokok Mubes ini, dan djuga erat sekali hubungannya dengan beberapa anak² tema, terutama masalah produksi pangan.

Hasil riset jang paling penting ialah sepenuhnya membenarkan kesimpulan Dekon tentang masih adanya sisa² feodalisme jang harus dikikis habis, bahkan hasil² riset membuktikan, bahwa ini merupakan hal jang sangat mendesak. Riset itu menunjukkan dengan sangat djelas bahwa penindasan kedjam di-desa² berlangsung melalui apa jang saja namakan „7 setan desa“, jaitu tuantanah djahat, lintahdarat, tukang idjon, tengkulak djahat, kapitalis birokrat, penguasa djahat dan bandit desa. Istilah „djahat“ mengenai tuantanah dipakai karena jang dimaksudkan ialah tuantanah² jang membangkang terhadap pelaksanaan UUPA dan UU-PBH. Tuantanah² jang mau melaksanakan kedua undang² negara ini, jang djumlahnya sangat sedikit, tidak termasuk golongan tuantanah djahat. Demikian pula, tengkulak dan penguasa tidak semuanya djahat, tidak semuanya kedjam. Jang mendjadi sasaran perdjjuangan kaum tani dewasa ini hanya mereka jang djahat, jang kedjam.

Bentuk penghisapan feodal jang paling pokok ialah monopoli tanah ditangan tuantanah jang menghisap kaum tani melalui sistim sewatanah feodal jaitu sewatanah jang berbentuk hasilbumi, kerdja atau uang. Kemelaratan kaum tani jang disebabkan oleh penghisapan feodal ini mengakibatkan bahwa mereka mendjadi mangsanja kaum lintahdarat, tukang idjon dan kaum tengkulak djahat jang melakukan berbagai matjam penghisapan sehingga disamping menjebabkan semakin melaratnja kaum tani, djuga menjebabkan proses pemusatan tanah berdjalan terus-menerus, artinya sistim feodal mendjadi semakin kuat.

Penemuan tentang adanya 7 setan desa adalah penting karena menunjukkan bahwa sisa² feodalisme

dinegeri kita merupakan suatu sistim jang luas dan bersegi-banjak dengan monopoli atas tanah sebagai porosnja. Kaum tani dihisap oleh tuantanah dan karenanja melarat. Karena itu lintahdarat bisa tumbuh subur, sebab kaum tani selalu membutuhkan pinjaman untuk menutupi kebutuhan jang paling elementer. Terdesak oleh kebutuhan² uang tunai, kaum tani dapat diperas setjara kedjam oleh tukang idjon. Demikian pula tengkulak djahat dapat memeras kaum tani baik dengan membeli hasil²nja dengan harga djauh dibawah harga pasar maupun dengan mendjual kebutuhan² kepada kaum tani dengan harga² djauh diatas harga pasar dengan sistim bazar-tjijtjilan. Kaum kapitalis birokrat jang sedang dengan tjepat muntjul diberbagai desa² djuga dapat melakukan penghisapan dengan gampang karena keadaan kaum tani begitu melarat. Penghisapan oleh tukang idjon, lintahdarat, dsb. makin lama memaksakan kaum tani jang masih memiliki tanah untuk melepaskan tanahnya sebagai borg atau melalui berbagai sistim gadai.

Kaum tani ibarat bola ping-pong jang dipukul oleh penghisap sini, lari kepenghisap sana, dipukul penghisap sana lari kepenghisap situ, dan seterusnya. Sedangkan setan² desa jang saja namakan penguasa² djahat dan bandit² desa merupakan alat² bagi kaum penghisap untuk mempertahankan dan memperdalam penghisapan dan oleh karenanja merupakan bagian integral daripada sistim feodalisme itu.

Adalah samasekali tidak masuk akal kesimpulan Sumitro bahwa satu²nja sumber kemelaratan kaum tani ialah tengkulak dan genggaman ekonomi melalui perkreditan dan perhutangan. Ini berarti menutup mata terhadap apa jang menjebabkan kaum tani sampai bisa mendjadi mangsanja tengkulak dan si-pemberi kredit. Mau tidak mau, kesimpulan Sumitro pun membuktikan tentang adanya penghisapan feodal, sekalipun ia berusaha untuk menjembujkannya.

Penghisap feodal menguasai seluruh kehidupan kaum tani. Ia tidak hanya membikin mereka sengsara dan sangat melarat tetapi djuga amat membatasi daya produktif mereka. Didalam buku jang telah saja tulis mengenai hasil² riset di Djawa Barat, saja menguraikan berbagai bentuk penghisapan jang terdjadi di-desa²

dengan memberikan tjontoh² yang diketemukan dalam riset yang saja lakukan itu. Dan berdasarkan bahan² riset tsb, saja menarik suatu kesimpulan sbb :

„Dengan demikian kaum tani sudah mendjadi sasaran penghisapan mulai dari ketika mereka menanam padi sampai kepada panennja dan djuga waktu mereka mau mendjual hasil panennja dan membeli barang² keperluan hidup se-hari² dan barang² untuk berproduksi kembali seperti alat² pertanian, pupuk, dls. Maka, sjarat² produksi kaum tani dikuasai betul oleh kaum tuantanah, lintahdarat, tukang idjon, kapitalis birokrat dan tengkulak”. (**Kaum Tani Mengganjang Setan² Desa**, djilid I, hal. 32). Selandjutnja saja simpulkan sbb: „Kemosotan taraf-hidup klas² yang merupakan tenaga produktif pokok didesa mengakibatkan kemosotan daja produksi pertanian. Disamping kekurangan makanan yang menurunkan daja-kerdja buruhtani dan tanimiskin, kemampuan tanimiskin dan tanisedang untuk mengongkosi produksi terus merosot. Hal ini langsung membahayakan proses produksi pertanian itu sendiri.” (**Kaum Tani Mengganjang Setan² Desa** djilid I, hal. 37).

Dengan demikian kaum tani sukar untuk melakukan reproduksi, artinja mentjiptakan kembali hasil² yang tjukup untuk menggantikan modal yang dipergunakan dalam siklus produksi janglalu termasuk tenaga-kerdjanja, apalagi untuk melakukan produksi, artinja mentjiptakan kekayaan materiil yang baru.

Dalam kesimpulan² ini, saja berusaha menggambarkan, bahwa hubungan² produksi feodal merupakan suatu sistim yang luas, yang bersegi banjak, dan yang sangat menghambat perkembangan tenaga² produktif di-desa². Tenaga² produktif didesa hanya akan dapat dibebaskan dari tekanan² ini dengan diachirinja hubungan² feodal tsb. Inilah sebabnja mengapa landreform merupakan bagian mutlak daripada revolusi Indonesia.

Tidak perlu kiranya saja menundjukkan betapa kesimpulan² ini berbeda dengan kesimpulan² Sumitro. Dalam segala hal dapat saja tekankan bahwa riset yang telah saja lakukan itu sepenuhnya membuktikan kepaluan analisa Sumitro dan kebenaran Dekon tentang perlunya sisa² feodalisme dikikis habis.

Pelaksanaan Dekon Dibidang Agraria Hanja Bisa Didjamin Dengan Mengganjang Setan² Desa.

Pelaksanaan Dekon di-desa², artinja pelaksanaan strategi dasar ekonomi, hanja mungkin tertjapai dengan mengganjang setan² desa. Dan ini sudah mendjadi kejakinan kaum tani Indonesia yang sedang bangkit dalam suatu gerakan untuk melawan setan² desa ini. Gerakan ini terutama timbul sebagai reaksi kaum tani terhadap aksi sefihak reaksioner setan² desa itu sendiri yang sudah lama berusaha keras untuk meng-halang²i pelaksanaan Undang² Negara yang madju, jaitu Undang² Perdandjian Bagi-Hasil (UUPBH) dan Undang² Pokok Agraria (UUPA).

Timbulnja kebangkitan kaum tani yang terutama mengambil bentuk dalam apa yang telah setjara luas dikenal sebagai aksi sefihak kaum tani melawan aksi sefihak tuantanah yang membangkang terhadap UUPA dan UUPBH ternyata telah membikin gègèr tuantanah dan pembela²nja, telah menimbulkan kehebohan dalam masjarakat kita, sehingga ada baiknja kiranya kalau saja djelaskan pokok² persoalannja karena menurut saja, persoalan ini tak mungkin dilepaskan dari tema Mubes ini, dari prinsip² dasar yang mendjiwainja dan dari berbagai anak² tema yang akan dibahas dalam komisi² Mubes nanti.

Diundangkannja UUPBH dan UUPA dalam tahun 1960 merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan politik dan ekonomi Indonesia. Dua undang² ini tidak merupakan landreform yang radikal, yang menghabistamatkan sisa² feodalisme. UUPA hanya membatasi luas pemilikan tanah oleh tuantanah, artinja masih memungkinkan seorang untuk „duduk ongang² mendjadi gemuk-gendut karena menghisap keringatnja orang² yang disuruh menggarap tanah itu”. Hanja, luas tanah yang boleh digunakan sebagai alat penghisapan dibatasi. Memang benar seperti apa yang dikatakan oleh Bung Karno dalam Djarek, bahwa „pada taraf sekarang landreform disatu fihak berarti penghapusan segala hak² asing dan konsesi² kolonial atas tanah dan mengachiri penghisapan feodal setjara berangsur²” (Tubapi, hal. 224). Sedangkan UUPBH

walaupun menguntungkan kaum tani, juga sangat terbatas sifatnya, yaitu hanya sekedar mengusahakan perbaikan sedikit dalam bagi-hasil yang diperoleh oleh penggarap. Jika sebelumnya UUPBH, sebagian besar penggarap tanah dengan sistem bagi-hasil harus menjerahkan 50% atau lebih dari hasil kotornya kepada tuantanah, artinya ongkos produksi ditanggung oleh penggarap dari bagiannya itu, maka jika UUPBH dilaksanakan, penggarap umumnya memperoleh paling sedikit 50% dari hasil bersih (pembagian di-masing² daerah ditentukan oleh Bupati sesuai dengan antier² 1 : 1 seperti yang ditetapkan didalam UUPBH) sedang penggantian ongkos² produksi jatuh ditangan penggarap dan tidak di-bagihasil-kan.

Tetapi kenyataan membuktikan, bahwa sekalipun terbatas, kedua undang² ini telah menimbulkan perlawanan yang luas sekali dari tuantanah² djahat yang mentjari segala akal djahat seperti misalnja „hibah-palsu“, „tjerai-palsu“ dan bahkan „mati-palsu“, untuk melakukan manipulasi dengan tanah-lebihnja, untuk menjegah pelaksanaan UUPA terhadap tanah-lebihnja dan, kalau akal² ini semuanya gagal, untuk mendjamia supaya tanah-lebihnja „dibagi“ kepada anggota keluarga kontjo²nja yang bukan penggarap, sehingga dengan demikian tanah tetap berada dalam kekuasaannya. Demikian pula, mereka sangat menentang UUPBH dan umumnya menolak untuk mengadakan perdjandjian² dengan penggarap yang sesuai dengan ketentuan² UUPBH itu. Betapa luas pelanggaran² terhadap UUPBH dapat dirasakan dari kenyataan, bahwa atas nasehat Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Menteri Pertanian dan Agraria telah merasa perlu mengeluarkan Peraturan Menteri No. 4, 1964 yang mengadakan sanksi² terhadap tuantanah yang melanggar UUPBH. Menurut Peraturan Menteri itu terhadap tuantanah tsb. dipaksakan suatu bagihasil 6 : 2 : 2, yaitu 6 untuk penggarap, 2 untuk Pemerintah dan 2 untuk tuantanah.

Bahwasanja UUPA dan UUPBH mengalami kematjetan saja rasa tidak terlalu mengherankan. Bukan- kah ini hanya membuktikan bahwa di Indonesia memang ada tuantanah dan ada sistem feodal? Jang boleh heran kiranya ialah mereka yang tadinja mengira bah-

wa di Indonesia tidak ada „tuantanah setjara besar²-an“!

Mula² kaum tani menjambut UUPA dan UUPBH dengan hangat sekalipun undang² ini hanya menguntungkan mereka setjara terbatas. Mula² kaum tani sangat mengharapkan dan menantikan pelaksanaannya. Tetapi apa yang terdidi? Manipulasi, pelanggaran, kehebohan, kemunafikan, jang semuanya menandai aksi sefihak reaksioner dari tuantanah djahat dibantu terutama oleh penguasa² djahat untuk menjegah pelaksanaan undang² yang sah sehingga UUPA dan UUPBH matjet, tidak berdjalan. Maka tidak mengherankan pula jika tiba gilirannya bagi kaum tani untuk bangkit mengadakan aksi sefihak revolusioner yang sesuai dengan tujuan revolusi, jang tujuannya untuk melaksanakan undang² resmi negeri kita. Mengapa kebangkitan kontra-revolusioner tuantanah² dan setan² desa lainnya tidak menimbulkan kehebohan, tetapi kebangkitan revolusioner kaum tani justru dihebohkan? Ini sungguh membukakan segala borok² jang tadinja tertutup oleh demagogi² revolusioner!

Dalam textbook² ekonomi liberal tentang kaum tani dan desa² di-negeri² yang biasanya disebut „underdeveloped“, kaum tani sering dikritik dan diedjek karena pasivitetnja, tidak suka hal² yang baru, sangat konservatif, dll. Tetapi kalau kaum tani Indonesia justru membuktikan dirinja bahwa mereka tidak konservatif, pasif dsb., kok dikatakan „mengamuk“, „rewel“, dsb. Hendaknya disadari oleh kita semua bahwa kaum tani Indonesia sedang memberikan suatu pelajaran yang sangat penting kepada kita semua yaitu bahwa suatu revolusi tidak bisa terdjadi kalau tidak digerakkan oleh kekuatan² didalam masyarakat sendiri. Riset yang saja lakukan membuktikan bahwa dimana berdjalan agak baik pelaksanaan UUPA dan UUPBH, jang seperti dikatakan oleh Bung Karno merupakan „selangkah maju“ diatas djalan revolusi kita, ini pada pokoknja disebabkan oleh karena aksi² jang dilaksanakan oleh kaum tani sendiri, kadang² dengan memberikan korban² jang tidak sedikit. Djadi bukan karena ketaatan para pedjabat pada undang² negara. Dari riset yang telah saja lakukan, ternyata bahwa

kira² 51.750 penggarap di Djawa Barat telah melaksanakan UUPBH atas luas tanah kira² 11.500 ha dan pada umumnya ini adalah hasil aksi² sefihak. Anehnya, angka² ini adalah djauh lebih tinggi dari angka² Panitia Pusat Landreform yang sampai sekarang baru mentjatat 25.345 perdjandjian menurut UUPBH untuk seluruh Indonesia atau hanya 9.628 perdjandjian untuk Djawa Barat. (Lihat „Laporan Perkembangan Pelaksanaan Landreform Sampai Achir Tahun 1963”, tgl. 15 Djanuari 1964). Tetapi angka yang lebih tinggi ini toh tidak lebih daripada setetes air dalam lautan penduduk Djawa Barat. Sebanyak 6.558.650 tani dewasa, diantara mana kurang-banyak 75% atau kl. 5 djuta adalah kaum tani lebih dari. 75% atau kl. 5 djuta adalah kaum tani yang menggarap tanah orang lain yang seharusnya sudah mengadakan perdjandjian bagi-hasil menurut UU-PBH. Artinja pelaksanaan UUPBH hanya kl. 1% (51.000 sebagai persentase dari 5 djuta) diseluruh Djawa Barat!

Ternyata bahwa gerakan tani agak lebih lengkap angka²nja tentang pelaksanaan UUPBH sehingga keadaan pelaksanaannya memang adalah sedikit lebih baik daripada apa yang digambarkan oleh Pemerintah. Tetapi dari gerakan tani dapat kita ketahui pula bahwa pelaksanaan ini adalah berkat aksi² kaum tani sendiri. Seharusnya Pemerintah berterimakasih kepada kaum tani karena telah mengadakan aksi² untuk melaksanakan suatu undang² resmi. Tetapi anehnya, ada pedjabat² Pemerintah yang tidak berterimakasih, bahkan yang memfitnah kaum tani dengan kata² „kontra-revolusioner”, „anarchis”, „mengatjau”, dsb.

Instruksi Pd. Presiden Leimena tgl. 15 Djuni 1964 yang tidak membenarkan tindakan sefihak dari golongan manapun hanya dapat difahami djika berdasarkan instruksi ini akan diambil tindakan² terhadap tuantanah² yang telah melakukan tindakan sefihak reaksioner melanggar UUPA dan UUPBH. Djika tindakan ini sunggu² diambil, maka aksi sefihak revolusioner kaum tani samasekali tidak diperlukan dalam usaha melaksanakan UUPA dan UUPBH.

„Stop Impor Beras!” Hanya Mungkin Ditjapai Dengan Mengganjang Setan² Desa.

Baru² ini, Bung Karno telah mengetengahkan suatu sembojan yang amat tepat, jaitu „stop impor beras!”, atau „laksanakan prinsip berdiri diatas kaki sendiri dibidang pangan!”. Sungguh suatu kegandjilan djika negeri kita yang begitu kaya-raja dan subur makin lama makin banjak mengimpor beras, sampai² impor beras menelan tak kurang dari seperempat daripada penghasilan ekspor kita. Keadaan ini harus segera diachiri.

Dalam mentjapai tudjuan ini, memang bisa diambil langkah² yang bersifat sementara jaitu dengan memperluas konsumsi bahan² makanan lainnja, terutama djagung. Tetapi satu²nja tjara yang permanen untuk mentjapai self-sufficiency atau mentjukupi diri dalam bahan makanan ialah dengan menaikkan produksi dan memperbaiki lalulintas barang² antara desa dan kota. Tidak dapat dibenarkan djika „stop impor beras” mau dilaksanakan dengan djalan mengurangi konsumsi bahan² makanan atau memperketijl djumlah distribusi pangan kepada pegawai negeri, angkatan bersendjata dsb. Djika distribusi ini dikurangi atau diganti dengan uang, maka ini akan mempunjai akibat yang sangat merugikan terhadap tingkat harga. Masalah pokok ialah produksi, dan selama masalah ini tidak dipetjahkan, selalu akan timbul kesulitan dalam masalah pangan, biar beras, djagung atau apa saja yang kita makan.

Seperti sudah saja djelaskan diatas, daja produksi kaum tani sedang merosot. Dengan masih berkuasanya setan² desa atas hasil pertanian kaum tani, maka sekali-pun kaum tani berhasil memperoleh panen yang baik, ini selalu akan direbut dan dimonopoli oleh setan² desa itu. Dan setan² desa itu bukan hanya merupakan sumber penghisapan terhadap kaum tani; mereka tidak kurang kedjam dalam mengatjaukan dan memanipulasi distribusi hasil² pertanian, semuanya untuk memperbesar keuntungan² mereka sendiri. Djika misalnja kita membahas masalah harga dalam pasaran beras, maka ternyata bahwa ada kontradiksi antara harga rendah yang dibutuhkan oleh para konsumen di-kota² dengan harga² tinggi yang harus dibayar untuk beras dan hasil²

pertanian lainnja. Tetapi hendaknja disadari, bahwa harga² tinggi itu samasekali tidak membawa keuntungan bagi kaum penggarap jang hanja kenal melarat sadja, dan jang terus dihisap oleh tukang idjon, tengkulak djahat dsb. Harga² jang tinggi itu merupakan akibat daripada salahurus kaum kapitalis birokrat dan akibat pula dari manipulasi serta monopoli setan² desa atas hasil produksi pertanian. Para penggarap sendiri tentu akan djauh lebih beruntung djika mereka tidak dihisap, djika mereka bisa memperoleh harga jang pantas bagi hasil²nja dan membeli kebutuhan²nja dengan harga pantas pula.

Dalam hubungan ini pula, perlu saja tegaskan bahwa otjehan² kaum sardjana ekonomi tertentu bahwa kaum tani „tidak dirugikan oleh inflasi” adalah suatu kebohongan besar. Analisa jang meleset ini djuga timbul karena keadaan kongkrit di-desa² samasekali tidak diketahui. Kaum buruhtani, tanimiskin dan djuga kaum tanisedang semuanya menderita sekali akibat adanya inflasi, karena mereka itu memang banjak membeli kebutuhan²nja dari pasar sedangkan peningkatan harga² semakin mendjadikan mereka sebagai mangsa setan² desa, terutama tukang idjon, lintahdarat dan tengkulak djahat. Berbeda sekali dengan kesimpulan palsu itu, riset jang telah saja lakukan di Djawa membuktikan bahwa inflasi menjebabkan makin tjepat proses konsentrasi tanah, makin melaratnja kaum tani dan makin kuat dan berdominasinja setan² desa, sehingga makin mendesak pula masalah pelaksanaan landreform untuk mentjegah kemerosotan dajaproduksi jang mendjadi salahsatu tjiri utama dalam desa² itu dewasa ini.

Dengan demikian njatalah, bahwa mengganjang setan² desa tidak hanja akan menguntungkan kaum tani tetapi djuga setjara langsung akan menguntungkan kaum konsumen bahan² pertanian di-kota². Djika setan² desa ini bisa dikikis habis, kita akan bisa mentjapai struktur harga antara desa dan kota jang menguntungkan baik kaum produsen di-desa² maupun kaum konsumen di-kota², karena terbukalah kemungkinan untuk mentjiptakan suatu hubungan pertukaran (komersiil) jang langsung antara produsen dan konsumen dengan tidak melalui setan² desa lagi.

Djelaslah kiranja, bahwa pelaksanaan sembojan

„stop impor beras I”, pelaksanaan prinsip berdiri diatas kaki sendiri dibidang pangan, pentjiptaan struktur harga jang menguntungkan antara desa dan kota semuanya tergantung pada tuntutan pokok jang dikemukakan dalam Dekon jaitu mengikis habis sisa² feodalisme, jang setjara kongkrit berarti mengganjang setan² desa sampai habis.

III. MENGEMBANGKAN ILMU EKONOMI INDONESIA JANG SESUAI DENGAN TUGAS NASIONAL-DEMOKRATIS MENUJU KEMASJARAKAT SOSIALIS INDONESIA

Saudara² jang berkumpul dalam Musjawarah ini adalah pekerdja ilmu. Melalui Musjawarah ini Sdr.² berusaha menggunakan ilmu masing² untuk membahas masalah² ekonomi Indonesia. Dengan mengambil Pelaksanaan Dekon sebagai tema pokok, maka pendekatan terhadap masalah² ekonomi adalah tepat, sebab Dekon merupakan suatu program ekonomi jang ilmiah karena sesuai dengan strategi umum revolusi Indonesia.

Achir² ini, makin banjak diketengahkan sembojan „ilmu untuk Rakat” atau „ilmu untuk revolusi” sehingga sudah dirasakan bahwa sembojan „ilmu untuk ilmu” telah mengalami kekalahan total dalam masjarakat. Tetapi ini tentu belum berarti, bahwa sembojan jang tepat, jaitu „ilmu untuk revolusi”, sudah dilaksanakan di-mana² dan dengan tjara jang tepat pula. Untuk menjedari benar² tepatnja sembojan „ilmu untuk revolusi” adalah perlu sekali lebih dahulu membongkar kepalusan sembojan „ilmu untuk ilmu”, sebab kalau kita tidak berbuat demikian, bisa djadi ada orang jang menganggap bahwa „ilmu untuk ilmu” adalah ilmu jang objektif, sedangkan „ilmu untuk revolusi” adalah ilmu jang subjektif.

Ilmu jang tidak berfihak, artinja ilmu jang objektif dalam artikata „impartial” hanja ada dalam bajangan orang² tertentu. Ilmu apapun adalah berfihak, djuga ilmu² eksakta dan ilmu² alam dalam arti bahwa ilmu² itu bagaimanapun djuga diperkembangkan kearah djujukan jang melajani kepentingan² klas atau golongan

jang berkuasa dalam masjarakat. Hal ini dapat kita buktikan dengan djelas kalau kita memperhatikan perkembangan ilmu tumbuh²an, ilmu geologi, ilmu kedokteran dsb. selama negeri kita dikuasai oleh kaum imperialis Belanda.

Apalagi, ilmu² sosial, termasuk dan terutama ilmu ekonomi, sepenuhnya mentjerminkan kepentingan klas atau golongan dan tak bisa dipisahkan dari kepentingan klas atau golongan. Ilmu adalah bagian daripada bangunan-atas sesuatu masjarakat, artinja merupakan alat bagi klas² jang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannja. Ini berlaku dimasjarakat feodal, dimasjarakat kapitalis, maupun dimasjarakat sosialis.

Didalam masjarakat Indonesia dimana masih terdapat sisa² imperialisme dan sisa² teodalisme, sudah barang tentu ilmu akan dipergunakan se-banyak²nja oleh mereka jang menguasai kehidupan ekonomi dinegara kita, jaitu kaum imperialis dan tuantanah serta kakitangan²nja untuk mempertahankan diri, apalagi dewasa ini dikala Manipol dan Dekon sudah menjatakan bahwa tugas kita ialah mengikis habis sisa² imperialisme dan feodalisme.

Tetapi disamping sisa² tsb, djuga terdapat aspek revolusioner, aspek Rakjat, dalam kekuasaan politik di Indonesia dan terdapat pula gerakan Rakjat jang bekerdjasama dengan aspek revolusioner dalam kekuasaan politik itu untuk menggantang sisa² imperialisme dan feodalisme sebagai tugas pokok dalam tahap revolusi sekarang ini. Aspek revolusioner dalam kekuasaan negara serta gerakan Rakjat ini tentu djuga seharusnya mempergunakan ilmu untuk memperkuat dan memperhebat perdjjuangan mereka, memperkuat dan memperhebat aspek revolusioner tsb. Inilah jang dinamakan „ilmu untuk revolusi” atau „ilmu untuk Rakjat”.

Kepada kita jang bertekad mewujudkan sembojan „ilmu untuk revolusi” setjara njata dituntut pekerdjaan jang banyak untuk merealisasi sembojan ini, artinja untuk memperkembangkan ilmu atau teori² ilmiah jang dapat mendorong maju gerakan revolusioner. Setjara kongkrit, bagi para pekerdja ilmu sosial, ini berarti mengembangkan teori² ilmiah jang dapat mendorong maju pelaksanaan Manipol dan Dekon. Ilmu sama-

tjam ini memang berfihak. Dan berfihak jang demikian adalah objektif karena berfihak kepada kebenaran, artinja berfihak kepada sesuatu jang berdjalan menurut hukum perkembangan sedjarah jang ditjiptakan oleh Rakjat.

Tentu mengembangkan ilmu jang mengabdikan diri kepada revolusi hanya bisa terdjadi dalam suatu proses perdjjuangan terhadap ilmu jang melawan arus revolusi atau jang kontra-revolusioner. Teori² ilmiah jang revolusioner hanya dapat dimenangkan sambil menelanjangi teori² jang kontra-revolusioner. Tanpa menelanjangi teori² jang kontra-revolusioner, teori ilmiah jang revolusioner tidak mungkin berkembang.

Hal² jang saja kemukakan diatas kiranya berlaku setjara khusus dibidang ilmu ekonomi karena ilmu ini adalah ilmu jang paling dekat dengan kepentingan² Rakjat. Bahkan seperti sudah saja katakan diatas, politik adalah pernyataan terpusat daripada ekonomi, dan ekonomi adalah dasar dan tudjuan daripada politik.

Adalah satu kenjataan, bahwa pada umumnja ilmu ekonomi jang diadjarkan dalam perguruan² tinggi Indonesia masih melandjutkan tradisinja jang lama jang mendapat inspirasi dari ilmu ekonomi burdjuis, ilmu ekonomi liberal. Djika tadinja ahli² ekonomi burdjuis Belanda besar pengaruhnja dalam perguruan tinggi Indonesia dibidang ekonomi, kedudukan mereka itu makin lama makin terdesak oleh ahli² ekonomi burdjuis Amerika Serikat jang setjara khusus melajani kepentingan² kaum imperialis AS untuk mendjadikan Indonesia dan negeri² baru merdeka lainnja sebagai daerah² kekuasaan neo-kolonialis mereka.

Teori² ekonomi liberal jang masih mempunyai tradisi kuat dalam fakultas² ekonomi Indonesia sudah tentu mendjadi perintang, utama untuk memperkembangkan dan mewujudkan program revolusioner kita dibidang ekonomi, jaitu Dekon. Saja dapat mengerti, kalau kaum sardjana ekonomi Indonesia mengalami kesukaran² besar karena Dekon mengharuskan mereka untuk merombak samasekali ilmu ekonomi jang mereka miliki selama ini. Banyak diantaranya jang samasekali tidak mau merombaknja sehingga mereka bersikap jang sangat negatif dan mengedjek terhadap Dekon. Malahan saja pernah membatja bahwa ada seorang dosen eko-

nomi yang suka menanjakan kepada mahasiswa²nja yang sedang diudji untuk mengemukakan „segi2 negatif“ daripada Dekon.

Ada pula yang tidak sampai setjara terbuka bersikap negatif terhadap Dekon, artinja mereka menerima dalam mulut, tetapi selalu menegaskan, bahwa Dekon harus dilaksanakan „setjara pragmatis“ yang pada pokoknja berarti berbuatlah apa yang dikehendaki dengan melepaskan prinsip². Semuanya ini dilakukan dengan dalih „agar sesuai dengan hukum² ekonomi“, seolah² Dekon itu sendiri adalah program yang tidak sesuai dengan hukum² ekonomi, tidak berdasarkan hukum² ekonomi, artinja hukum² yang sesuai dengan tugas² revolusi nasional-demokratis sekarang untuk menudju keekonomi sosialis Indonesia.

Dalam hubungan dengan masalah ini, saya ingin membahas beberapa segi daripada teori² yang disebarkan oleh Sumitro. Saya anggap hal ini penting untuk dapat mengembangkan suatu ilmu ekonomi Indonesia yang memang benar² bisa diabdikan kepada kepentingan² revolusi. Hal ini sukar ditjapai kalau teori² Sumitro yang berpengaruh diperquruan tinggi kita, terutama sedjak tahun 1950, belum ditelanjangi, belum diganjang habis²an.

Diatas telah saja kemukakan betapa palsuja kesimpulan Sumitro mengenai masalah agraria di Indonesia. Mengikuti pandangan Sumitro dalam hal ini berarti menentang Dekon yang menuntut agar sisa² feodal dikikis habis. Menurut Sumitro di Indonesia tidak ada masalah penghisapan feodal, oleh karena itu dengan sendirinja perdjjuangan melawan sisa² feodal adalah suatu omong-kosong. Kekeliruan pandangan ini sudah berakibat djauh sekali seperti kita lihat dewasa ini, dimana aksi² yang didjalankan oleh kaum tani untuk melaksanakan UUPA dan UUPBH yang merupakan suatu perdjjuangan anti-feodal, bukan hanya tidak disokong dan didorong oleh kalangan² tertentu, tetapi bahkan dihebohkan dan dikutuk sebagai aksi kontra-revolusioner. Sebab pokok daripada sikap ini ialah tidak mengakui atau tidak mau mengakui bahwa memang ada sisa² feodal di-desa² Indonesia, bahkan sisa² yang berat yang melakukan penghisapan feodal setjara

kedjam, dan bahwa sisa² feodal sedang berusaha keras untuk mempertahankan diri.

Sumitro terutama memperkembangkan teori² mengenai masalah pembangunan ekonomi dan berusaha mendjelaskan mengapa ekonomi Indonesia adalah ekonomi yang terbelakang. Sumitro berusaha menegaskan keterbelakangan ekonomi Indonesia sebagai akibat adanya suatu „vicious circle“ atau lingkaran yang tak berudjung-pangkal, suatu „vicious circle of poverty“ yang digambarkan sbb.: tidak ada penanaman modal karena tidak ada tabungan, tidak ada tabungan karena pendapatan² adalah rendah, pendapatan² adalah rendah karena produktivitet adalah rendah, dan produktivitet adalah rendah karena tidak ada penanaman modal. Djadi bagi Sumitro, keterbelakangan ekonomi Indonesia dan kemiskinan Rakjat Indonesia tidak ada hubungan-apapun dengan penghisapan imperialisme dan feodalisme. Menurut Sumitro Indonesia adalah miskin. karena apa? Karena Indonesia adalah miskin! Sungguh suatu penemuan yang mengagumkan!

Djadi, ada lingkaran tak berudjungpangkal daripada kemelatan. Dan dimana, menurut Sumitro, terbuka harapan untuk memulai dengan pembangunan? Sumitro mendjawab persoalan ini dengan mengutamakan masalah tabungan. Bahkan untuk Sumitro, tabungan memegang peranan yang strategis. Lihatlah, betapa bedanja dengan Dekon yang menjatakan bahwa mengikis habis sisa² feodal dan sisa² imperialis merupakan hal yang strategis bagi perkembangan ekonomi Indonesia!

Sumitro berkata: „Tiap usaha untuk menaikkan produktivitet harus bersandar atas tabungan. Tabungan disini diartikan sebagai kemampuan dan kesediaan untuk menahan nafsu konsumsi selama beberapa waktu supaya dimasa depan terbuka kemungkinan konsumsi yang lebih meluas“. (Ekonomi Pembangunan, hal. 65). Ini suatu kesimpulan yang aneh! Rakjat kita djustru menderita karena taraf konsumsi yang sedemikian rendahnja dan ini bukan hanya berarti taraf hidup yang rendah melainkan djuga daja produksi yang merosot. Tetapi teoritikus reaksioner Sumitro ternyata belum puas, dan mau menjuruh Rakjat kita untuk terus „menahan nafsu konsumsi“! Ini betul-betul mengingatkan kita pada andjuran para konseptor peraturan ekonomi

26 Mei 1963 jang djuga menjuruh Rakjat kita menderita katanja „untuk beberapa waktu”, tetapi ternyata makin lama makin banjak kesulitan² ekonomi dan makin merosot taraf-hidup Rakjat. Betapa berbeda semuanya ini dengan kesimpulan didalam Dekon jang mengatakan: „Sesuai dengan pertumbuhan kesadaran sosial dan kesadaran ekonomi rakjat Indonesia, maka tiap konsepsi dan tindakan Pemerintah harus dapat dirasakan dan dimengerti oleh rakjat, bahwa kepentingan mereka diperhatikan”. (Dekon, fasal 26).

Kesimpulan² Sumitro dengan sendirinja mengakibatkan berbagai andjuran tentang tindakan jang perlu diambil, dan dapat kita rasakan betapa andjuran²nya itu merugikan kepentingan Rakjat dan menguntungkan kaum penghisap.

Misalnja, Sumitro berkata sbb: „Pembentukan modal baru akan tertjipta, kalau pembagian pendapatan jang gandjil benar disertai oleh suatu pandangan hidup pada fihak golongan atas jang berdjaja puritanis, jang menekankan kerdja keras dan hidup setjara hemat”. (hal. 75). Djadi, dia bukannya mentjela „pembagian pendapatan jang gandjil” jang terdapat dalam masjarakat Indonesia, tetapi bahkan melihatnja sebagai faktor jang positif dan baik, asal disertai „djiwa puritanis” atau „djiwa sutji” digolongan atas. Dengan demikianlah akumulasi modal terdjadi di-negeri² kapitalis Barat jang telah menyebabkan kemelaratan luarbiasa bagi Rakjat pekerdja. Dan inilah tjontoh jang diandjurkan Sumitro untuk ditiru di Indonesia!

Tetapi ternyata, Sumitro tidak sampai kesitu sadja. karena njatanja ia tidak begitu yakin bahwa golongan atas kita akan memenuhi harapan²nja. Maka ia tjari lagi sumber² tabungan, dan sampailah dia pada suatu teori jang mengagumkan sekali, jaitu teori mengenai apa jang dinamakannja „disguised unemployment” atau pengangguran jang tak kentara. Esensi daripada teori ini adalah neo-Malthusianisme, jaitu bahwa penduduk Indonesia, terutama pulau Djawa adalah terlalu banjak sehingga sebagian adalah samasekali tidak produktif walaupun mereka sebenarnja bekerdja. Djadi, walaupun mereka bekerdja mereka dianggap „menganggur”. Bahkan ia menjimpulkan bahwa dari 56 djuta penduduk agraria Indonesia, artinja kaum tani

kita, 16 djuta „menganggur tak kentara” atau tidak produktif (lihat **Ekonomi Pembangunan**, hal. 83) hal-mana tidak dihubungkan samasekali dengan masih adanya feodalisme (memang menurut Sumitro „feodalisme tidak ada”) tetapi dengan masalah „kebanjakan orang”.

Kelebihan penduduk ini menurut Sumitro merupakan sumber tabungan jang sangat penting didalam ekonomi kita. Dan apa jang diandjurkannya? Supaja kelebihan penduduk ini dipindah kelapangan kerdja lain, ke-projek² pembangunan untuk mendjadi produktif. Tetapi menurut Sumitro, harus didjaga diatas segala²nja supaja tidak terdjadi suatu kenaikan tingkat konsumsi kaum penduduk desa (artinja kaum tani) setjara keseluruhannja. Kaum tani jang tinggal dilapangan pertanian disuruh olehnja mengongkosi kehidupan mereka jang pindah itu. Dengan demikian 56 djuta kaum tani Indonesia disuruh mempertinggi produksinja tetapi dilarang untuk mempertinggi konsumsinja. Setiap kenaikan konsumsi oleh kaum tani jang makin produktif ini bahkan dinamakan „pemborosan”. Dan djika „pemborosan” ini sampai terdjadi, maka ia akan mengundang modal dari luarnegeri (hal. 86) untuk menjediakan „tabungan komplementer”. Dengan siasat litjik ini, penanaman modal asing akan dapat menggerakkan tabungan² tersembunji dari kaum tani jang „menganggur tak kentara” itu, atau dalam kata lain menguasai tenaga² produktif kita setjara gratis. Inilah tjaranja untuk memindahkan sebagian kaum tani kita dari mangsa penghisapan feodal untuk setjara langsung mendjadi mangsa modal monopoli asing.

Tetapi disamping itu, bagaimanapun djuga „pemborosan” jang mungkin terdjadi harus diperketjil sedapat mungkin. Tjara²nja jalah tjara² jang klasik, jaitu dengan mempertinggi pajak jang dikenakan terhadap kaum tani, jaitu: „(a) pajak tidak langsung pada barang² jang dibeli oleh golongan petani, (b) pajak bumi, biasanja pajak atas pemilik tanah” (jang nota bene memang achirnja selalu mendjadi beban bagi penggarap — DNA) „dan (c) pajak dalam natura”. Mengenai jang terachir itu dikatakan bahwa „hal ini dapat dilaksanakan kalau diadakan pengawasan langsung oleh negara atas kehidupan chalajak ramai serta

kalau bahan makanan dipungut setjara langsung dju-
ga oleh alat² negara". (hal. 88).

Kebrutalan Sumitro tidak berhenti sampai disitu
saja. Bahkan dia mengemukakan bahwa penggerakan
kaum tani jang „menganggur tak kentara” memang
„telah didjalankan dalam sedjarah Indonesia”. Dan
dalam bentuk apa? Pembikinan bangunan² besar oleh
radja² feodal dizaman tengah, penanaman paksa, ro-
musha, kinrohoshi, keharusan penjerahan padi
dizaman kekuasaan kolonial Belanda dan dibawah
pendudukan Djepang, diakuinja „tidak berbeda
dengan pikiran tentang mobilisasi golongan pe-
nganggur tak kentara untuk berbagai rupa inves-
tasi dalam pembangunan ekonomi, meskipun dalam
bentuk dan tjorak jang berlainan” (hal. 91).
Untuk sedikit menutupi kedjahatannja, Sumitro meng-
akui bahwa ini „dapat ditafsirkan sebagai kebidjaksa-
naan jang kurang populer”. Memang tjara² kaum ko-
lonialis Belanda dan kaum fasis Djepang menghisap
kaum tani Indonesia bukan hanja „kurang populer”
tetapi dikutuk tudjuh keturunan oleh Rakjat Indonesia!

Demikianlah teori Sumitro jang meletakkan seluruh
beban pembangunan atas pundak Rakjat pekerdja, ter-
utama kaum tani, jang tak lain akan berarti bukan
hanja membiarkan penghisapan feodal berdjalan terus,
tetapi malahan menjempurnakan negara sebagai alat
untuk memperhebat penghisapan feodal dan penghi-
sapan modal asing atas kaum tani kita.

Masih ada satu segi lagi jang perlu dibahas sedikit
lebih mendalam dalam hubungan ini, iaitu peranan mo-
dal asing jang oleh Sumitro diberikan tempat jang sa-
ngat penting, seperti sudah saja singgung diatas. Mi-
salnja sadja, inflasi jang dilihatnja sebagai sumber ta-
hungan paksa jang menggeserkan pendapatan kepada
golongan atasan dan oleh karenanja mendorong pem-
bangunan, menurut Sumitro dapat dibenarkan sepenuh-
nja asal diiringi dengan pindjaman uang dari luarnegeri
untuk mengongkosi tambahan impor berupa barang²
konsumsi, jang katanja, akan membantu dalam menekan
inflasi. Dengan ini bertemulah kita dengan dasar te-
ori daripada peraturan² ekonomi 26 Mei 1963 jang se-
ngadja mendjalankan suatu politik inflatoir dengan ha-
rapan akan dapat „mengimbangi” inflasi itu dengan

modal asing jang diharapkan akan didapat dari AS se-
banyak \$ 400 djuta. Apakah dari sini belum tjukup djel-
as, bahwa peraturan ekonomi 26 Mei 1963 samasekali
bukan pelaksanaan Dekon, tetapi sepenuhnya pelaksa-
naan teori bangkrut Sumitro?

Bagi Sumitro, jang harus dipentingkan ialah pena-
naan modal asing dan untuk kepentingan ini ia meng-
andjurkan bahwa „harus ada kerdjasama antara nega-
ra² expor modal dan negara² jang membutuhkan modal.
Maksud kerdjasama ini ialah untuk mentjiptakan suatu
„iklim” jang menguntungkan lalulintas modal dalam
hubungan internasional”. Kerdjasama tsb. ditudjukan
untuk „kestabilan ekonomi dunia” jang „tergantung
dari kestabilan politik didalamnegeri maupun dilapang-
an internasional dalam hubungan antar-negara” (hal.
331, huruf tebal dari saja — DNA). Demikianlah
usaha Sumitro mempertahankan „the old established
order” dan demikianlah pengabdianja teori² Sumitro
pada modal asing, atau lebih tegasnja pada modal mo-
nopoli imperialis. Modal monopoli imperialis jang su-
dah ber-tahun² membikin Rakjat kita miskin dan mem-
bikin kaum imperialis kaya-raja, mau dipertahankan dan
diperbesar dengan dalih „untuk mengachiri kemiskinan
Rakjat Indonesia”. Benar² dapat kita rasakan satunja
teori² Sumitro dengan kelakuannja sebagai pemberon-
tak atau agen kaum imperialis Inggeris dan AS, jang
sekarang giat mengabdikan ilmunja pada kepentingan
kaum imperialis Inggeris dan AS jang berdiri dibela-
kang projek neo-kolonialis „Malaysia”. Inilah tjontoh
daripada praktek sembojan „ilmu untuk ilmu”. Betapa
objektifnja!

Sebenarnja, membongkar kebobrokan teori² Sumi-
tro masih bisa saja lakukan dengan pandjang lebar,
tetapi ini kiranja tjukup untuk membuktikan bahwa te-
ori² tsb. mewakili kepentingan kaum penghisap, teru-
tama kaum imperialis, tuantanah, kaum kapitalis kom-
prador dan kaum kapitalis birokrat, dan seharusnja
mendjadi kewadajiban perguruan tinggi kita untuk
menganjang habis teori² itu. Demi pelaksanaan Dekon
dan perkembangan ilmu ekonomi Indonesia jang revo-
lusioner teori² ekonomi reaksioner Sumitro harus diusir
dari perguruan² tinggi kita dan dari alam fikiran kaum
sardjana ekonomi kita.

Ilmu Ekonomi Indonesia Harus Mengabdikan Kepada Kepentingan Rakyat Pekerja Dan Revolusi

Memperkembangkan ilmu ekonomi yang sesuai dengan tugas revolusi nasional-demokratis kita menudju kemasjaraat Sosialis Indonesia tak mungkin ditjapai djika tidak didasarkan atas prinsip mengabdikan diri kepada kepentingan² Rakyat pekerja, terutama kaum buruh dan kaum tani yang telah dinjatakan sebagai sokoguru revolusi kita dan djuga sebagai „tenaga² yang paling produktif“ (Gesuri, hal. 33).

Pada dewasa ini dimana salahsatu tugas kita yang terpenting ialah mengikis habis sisa² feodalisme, ilmu ekonomi terutama perlu diabdikan kepada kepentingan² anti-feodal ini. Ini berarti mengachiri kesimpulan² yang meleset tentang tidak adanya feodalisme di Indonesia dan mengadakan riset di-desa² Indonesia untuk bisa mengenal keadaan masjaraat kita. Tujuan riset serta ilmu terutama ialah untuk melaksanakan tugas Dekon yang anti-feodal, dan oleh karenanya ia harus menjadikan kaum tani yang tertindas sebagai sumber informasinya.

Dalam hubungan ini ada yang mau menjangkal sifat ilmiah dari riset yang telah saja lakukan dipulau Djawa, yang menjadikan buruhtani dan tanimiskin, jaitu golongan² yang terhisap di-desa², sebagai sumber informasi yang utama. Ada orang yang berpendapat bahwa karena buruhtani dan tanimiskin umumnya butahuruf dan tingkat kebudajaannya sangat rendah, maka informasi dari mereka tidak dapat dipertjajai.

Saja sebaliknya berpendapat, bahwa buruhtani dan tanimiskin djustru merupakan sumber yang paling bisa dipertjajai karena mereka samasekali tidak berkepentingan untuk menutupi adanya fakta² penghisapan feodal di-desa². Bahkan mereka sepenuhnya berkepentingan untuk membongkarnya. Tentu kalau maksud riset kita ialah untuk menutupi penghisapan, maka yang paling baik ialah untuk menjadikan tuantanah dan setan² desa lainnya sebagai sumber informasi. Ilmu yang mengabdikan diri kepada revolusi, kepada Rakyat Indonesia, kepada sokoguru revolusi, hanya akan bisa

ditijptakan dengan riset yang mengambil kekuatan² revolusi itu sebagai sumbernya.

Achirnya, dalam hubungan ini perlu saja tegaskan, bahwa ilmu ekonomi Sosialis Indonesia djustru merupakan ilmu yang harus menjadi alat dalam menyelesaikan tugas² nasional-demokratis, karena inilah syaratnya bagi kita djika mau membangun Sosialisme di kemudian hari.

Achir² ini ada golongan² tertentu yang me-njindir² saja dan PKI sebagai orang² yang mau melakukan „fasen-sprong“, artinja mau tjepat² melakukan revolusi sosialis sebelum waktunya. Tetapi kenyataan adalah djustru sebaliknya. Kaum Komunis selalu menekankan kepada tugas sekarang, tugas anti-feodal dan anti-imperialis, dan bukan tugas kemudian hari, jaitu tugas pembangunan Sosialisme. Kaum Komunis Indonesia selalu menekankan pada masalah revolusi nasional-demokratis. Ini sering disambut dengan edjejan²: buat apa bitjara tentang itu² sja, kita kan sudah tahu. Tetapi djika kaum Komunis bertindak dengan setjara kongkrit melaksanakan tugas-tugas nasional-demokratis, maka kehebohan sengadja ditimbulkan, dan kami dikatakan „kaum fasen-sprong“! Dapatlah dirasakan bahwa dibalik edjejan terhadap seseorang yang berbitjara tentang tugas nasional-demokratis, sebenarnya terdapat ketidaksetudjuan yang benar² dapat dirasakan sekarang ini dimana perbuatan kaum tani untuk melaksanakan tugas nasional-demokratis atau tugas anti-feodal menimbulkan kehebohan yang tidak ketjil.

Oleh karena itu, saja berpendapat bahwa tugas pokok sekarang dalam mengembangkan ilmu ekonomi yang mengabdikan kepada revolusi Indonesia ialah tugas menggunakan ilmu ekonomi sebagai alat untuk mempertjepat selesainya tahap revolusi nasional-demokratis kita, sebagai satu²nya djaminan bahwa masjaraat sosialis Indonesia akan dapat dibangun dikemudian hari.

Ekonomi Politik Marxis Sebagai Satu²nya Ilmu Ekonomi yang Dapat Mengembangkan Teori² Ekonomi yang Revolusioner

Masalah terakhir yang ingin saja sampaikan dalam bagian ketiga prasaran saja ini ialah tentang ekonomi

politik Marxis (EPM) sebagai satu²nja ilmu ekonomi yang paling mampu mengembangkan teori² ekonomi yang revolusioner.

EPM merupakan salahsatu dari tiga komponen Marxisme dan samasekali berbeda dengan ilmu ekonomi burdjuis, karena titiktolaknja ialah hukum penyesuaian antara hubungan² produksi dengan tenaga² produktif sesuatu masyarakat. Tenaga² produktif yang terdiri dari tenaga-kerdja, alat² kerdja dan sasaran kerdja merupakan unsur yang paling dinamis dan yang terus-menerus berkembang dengan kemadjuan² teknik. Tetapi dalam keadaan dimana hubungan² produksi, artinja hubungan² antara manusia dengan manusia didalam proses produksi yang ditjerminkan dalam hubungan² klas dalam masyarakat berdasarkan pemilikan atas alat² produksi, menghambat perkembangan tenaga² produktif dan meng-halang²i kemadjuannya lebih lanjut, maka revolusi menjadi hal yang mutlak dengan tudjuan mengubah hubungan² produksi itu sebagai satu²nja djalan untuk membebaskan tenaga² produktif itu. Karena ekonomi politik Marxis berpandangan, bahwa struktur ekonomi, jaitu tjara produksi, menentukan struktur masyarakat, maka masalah ekonomi dilihatnja sebagai sesuatu yang integral dengan masalah politik. Dengan demikian, bagi seorang yang menguasai ekonomi politik Marxis, adalah gampang sekali untuk mengerti strategi dasar ekonomi Indonesia seperti yang dikemukakan dalam Dekon.

Oleh karena itu, ekonomi politik Marxis sewadjar-nja diberi tempat yang pantas dalam kurikulum semua universitas² dinegeri kita. Tetapi tentu ini tak akan ada gunanja ketjuali djika yang mengadakan matapelajaran ini betul² memahaminya, menguasainya dan menjintainya. Bung Karno sendiri sudah dengan tegas memberikan kepada ilmu Marxis suatu tempat yang sangat khusus dalam perkembangan ilmu revolusioner. Dalam suatu tulisan yang ditulis oleh Bung Karno 30 tahun yang lalu dan yang dimuat didalam Dibawah Bendera Revolusi, Bung Karno berkata sbb. : „Teori Marxisme adalah satu²nja teori yang saja anggap kompeten buat memetjahkan soal² sedjarah, soal² politik dan soal² masyarakat”. Tigapuluh tahun kemudian Bung Karno tetap pada pendiriannya itu, yang dapat kita lihat dari

pesan tertulis beliau kepada Ikatan Sardjana Rakjat Indonesia (ISRI) dimana dikatakan bahwa : „semua sardjana Indonesia yang ingin mengintegrasikan dirinya dengan Rakjat selalu mempeladjadi dan menguasai dua hal : pertama, situasi dan kondisi serta sedjarah Rakjat dan masyarakat Indonesia; kedua, ilmu dan teori Marxisme”.

Andjuran Bung Karno ini adalah tepat sekali. Andjuran yang pertama menunjukkan arti pentingnja riset dan sasaran riset, jaitu „mempeladjadi dan menguasai situasi dan kondisi serta sedjarah Rakjat dan masyarakat Indonesia”. Andjuran yang kedua dengan tegas menekankan bahwa setiap sardjana Indonesia harus menguasai ilmu dan teori Marxisme sebagai senjata ampuh untuk mengenal keadaan Rakjat dan masyarakat Indonesia dan mengubahnja sesuai dengan hukum² perkembangan yang objektif. Dengan demikian ditegaskan, bahwa sardjana Marxis mempunyai haridepan yang gilang-gemilang di Indonesia.

IV. DEKON ADALAH DJALAN KELUAR BAGI KESULITAN² EKONOMI DEWASA INI.

Pelaksanaan Dekon menjadi masalah pokok yang dibicarakan dalam Musjawarah Besar ini. Karena maksud kaum sardjana ekonomi mengadakan Mubes ini ialah untuk berusaha membantu Pemerintah dalam menjari djalan keluar dari kesulitan² ekonomi dewasa ini, maka djelaslah bahwa Mubes ini menjadari tentang pelaksanaan Dekon sebagai djalan keluar dari kesulitan-kesulitan tsb.

Dekon telah diumumkan kepada Rakjat Indonesia hampir 16 bulan yang lalu, jaitu pada tgl. 28 Maret 1963, tetapi seperti kita sama² mengetahui, sedjak waktu itu, kesulitan² ekonomi bukannya berkurang tetapi bahkan bertambah. Apakah ini salahnja Dekon? Samasekali tidak! Dekon memang telah diumumkan dan telah diterima dan disambut hangat oleh seluruh Rakjat Indonesia tapi harus kita akui, bahwa pelaksanaannya belum dimulai, bahkan pentjideraan terhadapnya yang terdjadi dengan peraturan² ekonomi 26 Mei 1963. Mudah²an Mubes ini akan berhasil merumuskan konsepsi²

yang kongkrit tentang apa yang perlu segera dilakukan dalam rangka melaksanakan Dekon.

Peraturan² ekonomi 26 Mei yang oleh para konseptornya (liberi advertensi "untuk melaksanakan Dekon" bukannya hanya tidak melaksanakan Dekon, tetapi malahan melanggarnya. Misalnja sadja, Dekon dengan tegas menyatakan bahwa „tidak akan diambil tindakan² moneter yang drastis seperti umpamanya devaluasi" (Dekon, fasal 31) tetapi tindakan² ekonomi 26 Mei justru merupakan devaluasi betapapun djuga perubahan kurs diselimuti dengan istilah „perangsang". Tentang mengatasi masalah² seperti inflasi kekurangan devisa dsb., Dekon mengatakan bahwa „tidak mungkin diatasi hanya dengan tindakan moneter konvensional belaka" (Dekon, fasal 13), tetapi justru inilah yang terdjadi dengan tindakan² 26 Mei. Dan harus kita akui pula, bahwa tindakan² ekonomi tgl. 17 April 1964 djuga pada pokoknja hanya merupakan „tindakan² moneter konvensional belaka", sehingga memang belum sesuai dengan Dekon. Oleh karena itu tindakan² ekonomi tgl. 17 April 1964 yang merupakan „saudara sepupu" dari „26 Mei 1963" harus paling kurang sepenuhnya disesuaikan dengan fikiran² progresif yang hidup dalam DPRGR.

Sebagai penutup prasaran saja ini, akan saja penting setjara singkat soal² yang menjejaskan Dekon merupakan djalan keluar dari kesulitan² ekonomi, sehingga pelaksanaannja mutlak perlu dan harus segera dimulai dengan sungguh².

(1) Satunja Strategi Dasar Ekonomi Dengan Kebidjaksanaan Djangka Pendek Dibidang Ekonomi.

Dekon sekaligus membahas strategi dasar ekonomi Indonesia dan kebidjaksanaan djangka pendek dibidang ekonomi. Ini berarti bahwa dua hal itu merupakan satu kesatuan. Tindakan² praktis yang perlu didjalkan dalam rangka kebidjaksanaan djangka pendek merupakan tindakan² yang dibutuhkan untuk mentjapai strategi dasar tsb. Maka dari itu, adalah tidak tepat djika yang djangka pendek dibahas setjara terpisah dari yang djangka pandjang. Makin sesuai kebidjaksanaan

djangka pendek dengan strategi dasar ekonomi, maka makin pendek djadinja djangka pandjang itu.

(2) Satunja Konsepsi² Ekonomi Dengan Sjarat² Pelaksanaannja.

Dekon berulang kali menekankan, bahwa kegotong-rojongan nasional berporoskan Nasakom mutlak perlu untuk bisa menanggulangi kesulitan² ekonomi. Terutama dalam Dekon fasal 34 ditekankan soal ini dan ditegaskan sbb: "Agar tertjapai kegotong-rojongan nasional berporoskan Nasakom untuk menanggulangi kesulitan² ekonomi, maka perlu diadkan pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakjat yang terorganisasi, dalam bidang administratif maupun eksekutif, dipusat maupun di-daerah". Kegotong-rojongan nasional berporos Nasakom telah diwujudkan diberbagai badan dan lembaga² negara, tetapi belumlah diwujudkan di badan eksekutif pusat, seperti yang diharuskan oleh Dekon. Partai² Nasakom mempunyai andil besar dalam usaha raksasa untuk menanggulangi kesulitan² ekonomi dan kalau partai² itu diwakili setjara wadjar didalam Kabinet, dapat dipastikan bahwa ini akan membuka kemungkinan yang luas untuk mendjamin sepenuhnya pengintegrasian antara Pemerintah dengan Rakjat.

Satu hal lagi yang sungguh penting djuga, dan yang mendapat tempat dalam Dekon, ialah masalah rituling. Sudah terlalu lama ekonomi negeri kita didjadikan sarang-main orang² yang korup dan yang tidak mengkonsolidasi sektor negara melainkan mengkonsolidasi dirinja sendiri dengan berbagai djalan sehingga mendjadi kapitalis² birokrat. Praktek² yang demikian masih terus berlangsung dan perlu segera diachiri karena membahayakan dan menggerowoti ekonomi negara. Bidang utama bagi usaha² rituling ialah bidang personalia, sebab betapapun baiknja rituling struktur dan organisasi, kalau personalia tetap orang² yang korup dsb, usaha² itu tak mungkin membawa faedah apapun. Ada orang yang suka bilang, bahwa rituling personalia tak ada gunanja, karena mungkin orang² baru yang ditundjuk adalah sama djelek dengan yang diritul. Tentunja ini bukan rituling yang tepat. Karena itu, harus ada patokan² djelas dalam mengangkat orang² baru, seperti Manipolis, djudjur, mampu, ahli dan patriotik.

(3) Production-Approach Merupakan Salahsatu Prinsip Utama Dari Dekon.

Dekon merupakan suatu kemenangan bagi apa yang dikenal sebagai "production-approach" (pendekatan dari segi produksi). Ini jelas dari penegasan tentang tidak tjukupnja tindakan² moneter yang konvensional tetapi lebih² jelas dari penegasan, bahwa „jang harus diselenggarakan jalah memperbesar produksi berdasarkan kekayaan alam yang ber-limpah²“ (fasal 6). Setjara lebih terperinci dikatakan, bahwa „ini berarti bahwa kita harus mengutamakan pertanian dan perkebunan, kita harus mementingkan pertambangan“, dan djuga bahwa kita harus „meletakkan dasar² untuk industrialisasi“ (fasal 6).

Djadi, Dekon tidak hanya mengambil „production-approach“ tetapi ia djuga menekankan kepada pertanian dan perkebunan sebagai dasar ekonomi, dan djuga kepada masalah industrialisasi. Djuga Dekon dengan kongkrit berbitjara tentang perlunya semua potensi nasional digerakkan dengan memerintji potensi² nasional sebagai potensi Pemerintah (sektor negara), potensi koperasi dan potensi swasta (nasional) dan domestik). Ditegaskan pula, bahwa "peranan rakjat rakjat sebagai buruh, rakjat sebagai tani, pendeknja rakjat sebagai produsen..... merupakan potensi dan kekuatan riil dan materiil" (fasal 18).

Dengan penegasan² ini, Dekon membikin jelas apa yang harus mendjadi tudjuan daripada setiap tindakan ekonomi, jaitu menggerakkan potensi produktif ini.

(4) Prinsip Pertjaja Pada Kekuatan Diri Sendiri.

Tentu hal ini sangat erat hubungannya dengan masalah production-approach karena djustru menggerakkan potensi² nasional merupakan djaminan satu²nja untuk bisa berdiri diatas kaki kita sendiri. Tetapi disamping aspek ini, Dekon djuga menekankan kepada kekuatan kita sendiri dalam membahas masalah² persediaan pangan yang tjukup serta menjediakan tjukup bahan² baku dan bahan penolong dan sebagainya untuk

industri dalam negeri, alat² pengangkutan dan sektor produksi pada umumnya. Dekon samasekali tidak membenarkan hubungan² kredit yang mengikat, seperti misalnya kredit imperialis AS yang terikat pada kesediaan kita mendjalankan tindakan² ekonomi yang sesuai dengan kepentingan mereka dan yang djuga terikat pada kesediaan kita untuk melepaskan konfrontasi dengan "Malaysia".

Kebenaran prinsip Dekon ini semakin dirasakan setelah negeri kita mengalami tindakan² 26 Mei tahun jl. yang djustru melanggar prinsip ini dan menaruh semua kepentjajaan pada kekuatan "bantuan" ekonomi imperialis.

(5) Politik Perpadjakan Dan Anggaran Belanja Jang Sesuai.

Dekon djuga memuat beberapa prinsip penting mengenai hal perpadjakan, misalnya bahwa padjak tidak boleh menambahkan beban atas pundak Rakjat, bahwa sistim perpadjakan harus memlorong usaha² produsen, meratakan akumulasi modal dalam pembangunan dan mendjadikan perusahaan² negara sebagai sumber keuangan negara yang utama. Tentang anggaran belanja negara ditegaskan, bahwa ia harus digunakan sebagai alat untuk mensukseskan kebidjaksanaan yang termuat dalam Dekon itu.

Beberapa prinsip ini adalah antara lain prinsip² Dekon yg. djika dilaksanakan dengan baik, pasti akan bisa membawa negeri kita dari situasi ekonomi yang sulit kepada situasi dimana kita ber-angsur² semakin berhasil dalam menanggulangi kesulitan² tsb.

Dekon merupakan djalan keluar karena disamping mengemukakan strategi dasar ekonomi yang sesuai dengan strategi umum revolusi Indonesia, ia djuga berdasarkan segala hal pada usaha² untuk menggerakkan potensi nasional, terutama kaum produsen. Ini benar² suatu pandangan yang berbeda dengan kaum penganut

"vicious circle" jang bukannya mau menggerakkan potensi nasional dan potensi produsen, tetapi bahkan bertudjuan menekan potensi2 itu.

Dekon memang merupakan „Manipolnja Ekonomi" jaitu program revolusioner dibidang ekonomi, dan ia harus dilaksanakan setjara revolusioner pula. Mudah-mudahan Mubes ini akan memberikan sumbangan jang kita semua harapkan dalam mengandjurkan konsepsi2 jang sepenuhnya sesuai dengan semangat dan isi revolusioner Dekon.